

**PROGRAM DINAS PERIKANAN KABUPATEN ASAHAN
DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
DESA SUBUR KECAMATAN AIR JOMAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

OLEH:

**WAHYU RIZKY PARMANDA
NIM. 13154042**

Program Studi: Pengembangan Masyarakat Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA**

MEDAN

2019

**PROGRAM DINAS PERIKANAN KABUPATEN ASAHAN
DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
DESA SUBUR KECAMATAN AIR JOMAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh

**WAHYU RIZKY PARMANDA
NIM. 13154042**

Program Studi: Pengembangan Masyarakat Islam

Pembimbing I

Pembimbing II

**Prof. Dr. H. Abdullah, M.Si.
NIP. 196212311989031047**

**Dr. Salamuddin, MA.
NIP. 197407192007011014**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

Nomor : Istimewa Medan, 11 Juni 2019
Lamp : 7 Exp. Kepada Yth:
Hal : Skripsi Bapak Dekan Fakultas Dakwah
An. Wahyu Rizky Parmanda dan Komunikasi UIN SU
di-
Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan saran-saran seperlunya untuk memperbaiki dan kesempurnaan skripsi mahasiswa An. Wahyu Rizky Parmanda yang berjudul “Program Dinas Perikanan Kabupaten Asahan dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Subur Kecamatan Air Joman”, kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Mudah-mudahan dalam waktu dekat, saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Demikian untuk dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Abdullah, M.Si.
NIP. 196212311989031047

Pembimbing II

Dr. Salamuddin, MA.
NIP. 197407192007011014

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wahyu Rizky Parmanda
NIM : 13.15.4.042
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Judul Skripsi : Program Dinas Perikanan Kabupaten Asahan dalam
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Subur
Kecamatan Air Joman

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri. Pengutipan-pengutipan yang penulis lakukan pada bagian-bagian tertentu dari hasil karya orang lain dalam penulisan skripsi ini, telah dicantumkan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya penulis atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, Juni 2019

Yang membuat pernyataan,

Wahyu Rizky Parmanda

NIM: 13.15.4.042

Wahyu Rizky Parmanda. Program Dinas Perikanan Kabupaten Asahan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Subur Kecamatan Air Joman. (2019)

Skripsi, Medan: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Medan, 2019.

ABSTRAK

Nama : Wahyu Rizky Parmanda
NIM : 13.15.4.042
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Abdullah, M.Si
Pembimbing II : Dr. Salamuddin, MA
Judul Skripsi : Program Dinas Perikanan Kabupaten Asahan dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Subur Kecamatan Air Joman

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan apa saja program Dinas Perikanan, pelaksanaan pendampingan dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang telah disusun serta mengungkapkan kendala dan solusi oleh Dinas Perikanan Kabupaten Asahan dalam melaksanakan program tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

Hasil temuan penelitian adalah upaya yang dilakukan Dinas Perikanan melalui budidaya ikan lele dengan memberikan program Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), program Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), dan program Bantuan Benih Ikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Subur Kecamatan Air Joman. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh tim pendamping Dinas Perikanan Kabupaten Asahan dengan pertama sekali melakukan pelatihan dan penyuluhan bagi masyarakat yang turut berpartisipasi dalam program tersebut. Setelah itu tim pendampingan tetap intens dalam mengawal masyarakat yang turut berpartisipasi sehingga tujuan dari seluruh program membuahkan hasil yang baik. Kendala yang dihadapi Dinas Perikanan yaitu tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, dan kurangnya partisipasi masyarakat.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan kenikmatan berupa Iman, Islam dan juga kesehatan serta kekuatan kepada penulis, walaupun dengan langkah tertatih-tatih namun dengan penuh keyakinan dan ridho Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sembari dengan senantiasa berdoa semoga kita termasuk orang-orang yang diberkahi-Nya. Selanjutnya shalawat dan salam disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islam berupa ajaran yang hak lagi sempurna bagi manusia dan seluruh penghuni alam ini.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) jenjang perkuliahan strata I Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Judul skripsi ini adalah “Program Dinas Perikanan Kabupaten Asahan dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Subur Kecamatan Air Joman”.

Peneliti menyadari dalam proses penelitian skripsi ini tidak terlepas dari hambatan dan kesulitan, namun Alhamdulillah berkat bimbingan, bantuan, nasehat, arahan dan saran serta kerja sama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT maka segala kesulitan dan hambatan tersebut penulis hadapi sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Untuk itu memulai kata pengantar ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Terima kasih yang sedalam-dalamnya saya ucapkan dengan sepenuh hati, segenap jiwa dan raga, khusus untuk orang yang paling berarti dalam hidup saya, yang telah berjuang dan berkorban demi saya yaitu kedua orang tua saya yang tercinta, Ayahanda tercinta Suparlik dan ibunda tercinta Nismah

Sinambela. Serta Abang-abang saya Hery Rhavendra S.Pi, Reza Fahlevy S.E, serta kakak-adik saya Maharani S.Pd, Nurul Afrina Prastiwi yang saat ini sedang menempuh *study* di jurusan Ilmu Komunikasi UIN Sumatera Utara, dan keluarga saya yang telah banyak memberi kasih sayang cinta, nasehat, dukungan, doa, semangat, pengorbanan, dan perjuangan yang tidak akan saya lupakan, maupun bantuan materil sehingga perkuliahan dan penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dengan baik dan tepat pada waktunya. Terima kasih Ayahanda, Ibunda hanya Allah yang dapat membalas kebaikan dan pengorbanan yang telah Ayah dan Ibu curahkan untuk anakmu Wahyu Rizky Parmanda.

2. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Soiman, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III para seluruh karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
4. Bapak Dr. Muaz Tanjung, MA selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Bapak Dr. Salamuddin, MA selaku Sekretaris Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, dan kakanda Atikah Asna selaku staff jurusan yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini tepat pada waktunya.
5. Bapak Prof. Dr. Abdullah, M.Si selaku Pembimbing Skripsi I dan Bapak Dr. Salamuddin, MA selaku Pembimbing Skripsi II yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan, arahan dan saran-saran yang baik dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas kesabarannya dalam membimbing penulis selama ini, semoga amal kebaikan Bapak di balas oleh Allah SWT.
6. Ibu Dr. Nurhanifa, MA selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan masukan di proposal skripsi sebelumnya.

7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan ilmu dan nasehat selama di bangku perkuliahan.
8. Bapak Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Asahan, Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Asahan, dan tim pendamping pemberdayaan Dinas Perikanan yang telah bersedia membantu penulis dalam penyelesaian skripsi.
9. Responden yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan jawaban pada wawancara dalam penelitian ini.
10. Sahabat-sahabat di jurusan PMI stambuk 2015 dan sahabat lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih semua canda-tawa, suka-duka serta dukungan dan bantuan kalian banyak membantu penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dari sumber maupun teknik penulisannya, semua ini karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada penulis. Oleh sebab itu penulis membuka diri terhadap saran dan masukan dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis panjatkan doa agar seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, semoga atas bantuan dan amal baiknya mendapat imbalan dan pahala dari Allah SWT. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun penulis berikutnya, dan juga pembaca di masa yang akan datang. Sekali lagi penulis ucapkan ribuan terima kasih.

Medan, 11 Juni 2019 M
07 Syawal 1940H

Wahyu Rizky Parmanda
NIM. 13154042

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....iv

DAFTAR TABELvii

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Rumusan Masalah8

C. Tujuan Penelitian8

D. Batasan Istilah9

E. Kegunaan Penelitian11

F. Sistematika Pembahasan13

BAB II LANDASAN TEORI14

A. Kerangka Teori14

1. Teori Pembangunan14

2. Teori Pemberdayaan Masyarakat.....17

B. Kerangka Konsep.....18

1. Pemberdayaan Masyarakat18

a. Prinsip dan Dasar Pemberdayaan.....19

b. Proses Pemberdayaan Masyarakat.....20

c. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat21

2. Program Pendampingan Masyarakat	23
a. Pengertian Program.....	23
b. Pengertian Pendampingan Masyarakat	24
c. Konsep Pendampingan Masyarakat	26
C. Penelitian Terdahulu	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Sumber Data.....	32
1. Data Primer	32
2. Data Sekunder.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
1. Wawancara atau Interview.....	33
2. Pengamatan atau Observasi	34
3. Dokumentasi	34
E. Teknik Analisis Data.....	35
F. Teknik Keabsahan Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	37
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	37
1. Sejarah Desa Subur.....	37
2. Komposisi Penduduk	39
3. Pendidikan	40

4. Mata Pencaharian.....	41
5. Sosial-Budaya	42
6. Sarana dan Prasarana	44
B. Profil Dinas Perikanan Kabupaten Asahan	47
1. Latar Belakang Dinas Perikanan Kabupaten Asahan	47
2. Visi dan Misi Dinas Perikanan Kabupaten Asahan	47
3. Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Asahan	49
C. Upaya Dinas Perikanan Kabupaten Asahan.....	51
1. Program Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	54
2. Program Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)	55
3. Program Bantuan Benih Ikan.....	57
D. Pelaksanaan Pendampingan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	62
E. Kendala Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.....	65
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69
DAFTAR WAWANCARA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

4.1	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Jumlah KK, Kepadatan Penduduk	38
4.2	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur	39
4.3	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	40
4.4	Tingkat Pendidikan Masyarakat	41
4.5	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	42
4.6	Keadaan Penduduk Berdasarkan Agama	42
4.7	Keadaan Penduduk Berdasarkan Suku	43
4.8	Fasilitas Bangunan di Desa Subur	46
4.9	Daftar Pegawai Kantor Dinas Perikanan Kab. Asahan	50
4.10	Uraian Kegiatan Dinas Perikanan	53
4.11	Progres Kegiatan Dinas Perikanan	54
4.12	Laporan Perkembangan Produksi Pembesaran Rumah Tangga	
	Budidaya Perikanan Desa Subur	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya pencapaian kesejahteraan masyarakat dilalui dengan jalan perubahan-perubahan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Perubahan tersebut dilakukan melalui pembangunan. Tujuan pembangunan masyarakat ialah perbaikan kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat, sehingga kemiskinan dan lingkungan hidup masyarakat mengalami perubahan.

Sejalan dengan perkembangan kemampuan rakyat dalam pembangunan dan berkurangnya campur tangan pemerintah pusat terhadap daerah maka pembangunan seharusnya diarahkan untuk merubah kehidupan rakyat menjadi lebih baik. Perencanaan dan implementasi pembangunan seharusnya merupakan usaha untuk memberdayakan rakyat sehingga mereka mempunyai akses terhadap sumber-sumber ekonomi.

Pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara atau bangsa. Dengan demikian pembanguan dapat menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Contohnya seperti pembangunan dibidang ekonomi, apabila pembangunan ekonomi telah berjalan dengan baik maka pembangunan dibidang lain akan berjalan dengan baik.¹

¹Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 4.

Pembangunan merupakan suatu konsep perubahan sosial yang terus menerus menuju kearah perkembangan dan kemajuan yang lebih baik dan berkesinambungan. Pembangunan diupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat. Pembangunan dapat mewujudkan perbaikan lingkungan yang mendukung proses keberlanjutan pembangunan.

Pembangunan juga diartikan sebagai usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan, perubahan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.² Pengertian tersebut memiliki arti bahwa pembangunan merupakan suatu proses perbaikan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa secara terencana.

Dalam pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen proses pembangunan desa. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu dibangkitkan terlebih dahulu oleh pihak lain seperti pemerintah desa. Sehingga dengan adanya keterlibatan pemerintah desa, masyarakat akan merasa diberi peluang atau kesempatan ikut serta dalam pembangunan. Pada dasarnya menggerakkan partisipasi masyarakat desa merupakan salah satu sasaran pembangunan desa itu sendiri. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-A'raf (7) ayat 96:³

²Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1980), hlm. 23.

³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Intermasa, 1933)

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَا

نَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾ الأعراف: ٩٦

Artinya : “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS. Al – A’raf ayat 96).

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mutlak diperlukan, tanpa adanya partisipasi masyarakat pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat sebagai objek semata. Salah satu kritik adalah masyarakat merasa “tidak memiliki” dan “acuh tak acuh” terhadap program pembangunan yang ada. Penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlak diperlukan sehingga masyarakat akan dapat berperan serta secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan, terlebih apabila kita akan melakukan pendekatan pembangunan dengan semangat kualitas.

Secara historis, desa merupakan embrio bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia. Jauh sebelum Negara dan pemerintahan ini terbentuk, etnisitas sosial sejenis desa atau masyarakat adat dan lain sebagainya, telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi sangat penting. Mereka ini merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri yang

mengakar kuat, secara relatif mandiri dari campur tangan etensitas kekuasaan dari luar.⁴

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, mengatur secara khusus tentang desa, termasuk perangkat desa dan sumber keuangan desa. Salah satu misi yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah membangun harmonisasi antara desa dalam kawasan pedesaan sehingga dapat memperkuat proses perencanaan partisipatif. Untuk memperkuat kerjasama antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat dalam menyongsong pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa maka harus memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mencapai kesejahteraannya dan menjadi desa yang otonom dan berkualitas.⁵

Dengan demikian, sebuah perkembangan dan pertumbuhan dapat dimulai dari daerah-daerah yang lingkupnya lebih kecil seperti desa. Pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan desa memiliki arti dan peranan yang penting dalam mencapai tujuan nasional. Desa beserta masyarakatnya merupakan basis ekonomi, politik, soial budaya dan pertahanan keamanan. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.⁶

Pembangunan desa pada suatu wilayah kecamatan perlu ditumbuh-kembangkan dengan berbagai program kegiatan untuk mendorong tumbuhnya Sumber Daya Alam

⁴Purwo Santoso, *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 2.

⁵Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁶Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Perdesaan: Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, konsep Desa Pusat Pertumbuhan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 13.

(SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM). Pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya berbagai kegiatan pembangunan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah yang menyadari akan pentingnya pembangunan desa tentu akan mengoptimalkan perannya dalam mendorong percepatan pembangunan desa. Melalui upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah.

Dalam rangka melaksanakan wewenang pemerintahan, pemerintah berkewajiban meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban. Dengan menjalankan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yakni akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Oleh karena itu, pembangunan desa harus dilakukan secara terencana dan partisipatif serta menyentuh kebutuhan riil masyarakat agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya baik dari segi pendidikan, kesehatan dan pendapatan/ekonomi masyarakat.

Dalam Undang-Undang Otonomi Daerah nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu pada pasal 208 “Tugas dan kewajiban kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah”.⁷ Peraturan Pemerintah tersebut terdapat dalam Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2005 tentang pemerintah desa yaitu pasal 8 yang isinya “Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.”⁸

Dari ketentuan diatas, kiranya dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa yaitu kepala desa adalah sebagai administrator pembangunan pada bidang pemerintahan, bidang kemasyarakatan, bidang ekonomi, bidang keamanan dan ketertiban, serta administrator pada bidang-bidang hukum dan adat. Konsekuensi dari kenyataan tersebut, kepala desa harus mampu memposisikan dirinya sebagai pemimpin masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan dengan tujuan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Keadaan ini yang terkadang kurang dipahami oleh pemerintah desa sehingga antara harapan masyarakat dengan kenyataan yang dihadapi tidak pernah bersentuhan, dengan kata lain antara ketentuan dengan rasa ego yang saling berhadapan.

Hal yang menarik dan sejauh pengamatan penulis di Desa Subur terlihat bahwa kepala desa sudah maksimal dalam melakukan fungsi motivator. Kemudian keadaan yang terjadi di Desa Subur pemerintah desa yakni kepala desa sebagai motivator pemerintahan sudah amanah dalam memberikan pelayanan di tengah-tengah

⁷Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah

⁸Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

masyarakat. Seperti program pendampingan dalam pemberdayaan masyarakat yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan melalui Dinas Perikanan sangat antusias diterima oleh pemerintahan desa dan masyarakat Desa Subur. Dengan pendampingan yang dilaksanakan Dinas Perikanan dapat membantu pemerintah desa dalam menjalankan program pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.

Pendampingan masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Asahan sudah dimulai sejak awal tahun 2017. Demi terwujudnya visi Kabupaten Asahan yang Religius, Sehat, Cerdas, dan Mandiri. Dari visi tersebut Dinas Perikanan mempunyai program pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan Desa Subur sebagai desa yang mandiri.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan Dinas Perikanan dengan menyalurkan ratusan ribu bibit ikan untuk dimanfaatkan masyarakat Desa Subur sebagai sumber ekonomi masyarakat. Dinas Perikanan juga turut andil dalam menjadikan Desa Subur sebagai desa terbaik tingkat provinsi Sumatera Utara dan menjadikan tim Pemberayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai juara II tingkat Nasional dalam lomba hatinya PKK atau pemanfaatan lahan pekarangan pada tahun 2018. Dengan demikian pelayanan akan kebutuhan masyarakat dalam bidang ekonomi, pertanian, serta perikanan semakin terpenuhi.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Program Dinas Perikanan dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Subur Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka peneliti mencoba mengemukakan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Dinas Perikanan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui budidaya ikan air tawar di Desa Subur Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan?
2. Bagaimana pelaksanaan pendampingan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Subur Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi Dinas Perikanan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Subur Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui upaya Dinas Perikanan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui budidaya ikan air tawar di Desa Subur Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan.
2. Mengetahui pelaksanaan pendampingan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Subur oleh Dinas Perikanan Kabupaten Asahan.
3. Mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Perikanan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Subur Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan.

D. Batasan Istilah

Guna tidak terjadinya salah paham terhadap kata-kata ataupun kalimat yang terdapat pada judul penelitian ini, maka penulis menggunakan batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Masyarakat

Kartasmita menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah ide atau konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*people-centered, participatory, empowering and sustainable*”.⁹ Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan lebih lanjut (*safety net*). Pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa lalu.

Konsep pemberdayaan menurut Prijono dan Pranarka yaitu manusia adalah subyek dari dirinya sendiri. Proses kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya.¹⁰

Berdasarkan beberapa pengertian pemberdayaan yang dikemukakan tersebut maka dapat disimpulkan pemberdayaan adalah suatu proses dan upaya untuk

⁹Ginandjar Kartasmita, *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta : CIDES, 1996), hlm. 45.

¹⁰Prijono dan Pranarka, (ed)., *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta: CSIS, 1996), hlm. 55.

memperoleh atau memberikan daya, kekuatan, atau kemampuan kepada individu masyarakat lemah. Agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi. Sekaligus memilih alternatif pemecahnya dengan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara mandiri.

Pemberdayaan masyarakat dalam penelitian ini merupakan tujuan dari pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Asahan dalam bidang ekonomi dan akan melibatkan seluruh elemen masyarakat desa Subur Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan.

2. Program

Program adalah daftar terinci mengenai acara dan usaha yang akan dilaksanakan. Yang dimaksud dengan program pada judul penelitian ini adalah daftar acara atau usaha yang akan dilakukan melalui pendampingan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat Desa Subur Kecamatan Air Joman.

3. Pendampingan Masyarakat

Pendampingan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh fasilitator atau pendamping masyarakat dalam berbagai kegiatan program. Fasilitator sering juga disebut fasilitator masyarakat (*community facilitator* / CF). Tugasnya lebih sebagai pendorong, penggerak, katalisator, motivator masyarakat, sementara pelaku dan pengelola kegiatan adalah masyarakat sendiri.

Pendampingan menurut Suharto merupakan satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.¹¹ Pendampingan berintikan sebagai upaya menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Dengan demikian, pendampingan bukan saja dilakukan oleh tenaga pendamping atau petugas lapangan kepada masyarakat tetapi juga dibutuhkan keterlibatan masyarakat sebagai potensi utama untuk dikembangkan dan mengembangkan diri. Masyarakat lebih mengetahui apa yang dimiliki dan apa yang menjadi permasalahannya.

Pendampingan masyarakat Dinas Perikanan yang dimaksud disini adalah bagaimana peran Dinas Perikanan Kabupaten Asahan dalam program pendampingan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Subur Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan.

E. Kegunaan Penelitian

Selanjutnya apabila penelitian ini berhasil dengan baik, diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun kegunaan penelitian ini:

1. Kegunaan secara praktis;
 - a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang bagaimana program pendampingan masyarakat pada umumnya dan pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Asahan pada khususnya.

¹¹Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 93.

- b. Dapat menjadi masukan dan motivasi bagi pemerintah desa yang ada di kabupaten Asahan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat yang lebih baik sehingga dapat menjadi julukan desa yang terbaik.
 - c. Dapat menjadi masukan bagi dinas-dinas di Kabupaten Asahan maupun instansi di berbagai daerah dalam melakukan program pendampingan masyarakat dalam aspek pemberdayaan masyarakat yang lebih baik.
2. Kegunaan secara teoritis:
- a. Memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat khususnya Dinas Perikanan Kabupaten Asahan dalam meningkatkan program pendampingan masyarakat.
 - b. Memberikan informasi tentang teori-teori tentang pembangunan, pendampingan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.
 - c. Memberikan sumber bacaan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi dalam memenuhi matakuliahnya tentang bagaimana peran pendampingan masyarakat ataupun pemberdayaan masyarakat desa.

3. Kegunaan secara akademis:

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan Ilmu Pengetahuan, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap Pendampingan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat atau penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan dibagi dalam lima bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini penulis mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan istilah, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan

Bab II Landasan Teori, yang terdiri dari kerangka teori, kerangka konsep dan penelitian terdahulu. Kerangka teori membahas tentang teori pembangunan dan teori pemberdayaan. Sedangkan kerangka konsep membahas tentang konsep pemberdayaan masyarakat dan konsep program pendampingan masyarakat.

Bab III berisikan tentang Metodologi Penelitian, terkait dengan penulisan skripsi ini yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV merupakan Hasil Penelitian, yang meliputi gambaran umum dari lokasi penelitian, upaya serta program Dinas Perikanan Kabupaten Asahan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Subur, pelaksanaan pendampingan masyarakat dari Dinas Perikanan Kabupaten Asahan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Subur, hambatan dan keberhasilan Dinas Perikanan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Subur Kecamatan Air Joman.

Bab V merupakan bab penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran yang membangun bagi objek penelitian bisa lebih baik lagi kedepannya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Teori Pembangunan

Dalam sebuah buku karangan M. Anwas berjudul “*Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*” oleh beberapa ahli salah satunya Susanto mengatakan bahwa pembangunan adalah perubahan, pertumbuhan, pemenuhan kebutuhan, peningkatan martabat dan harga diri. Pembangunan (*development*) secara umum identic dengan proses perubahan yang direncanakan, atau perbaikan kondisi menuju kearah yang lebih baik. Pembangunan adalah sebuah upaya mencapai kemajuan umat manusia. Secara umum pembangunan seringkali dikaitkan dengan pencapaian serta peningkatan kesejahteraan secara ekonomis. Pembangunan merupakan perubahan dalam pemenuhan kebutuhan dalam peningkatan kualitas hidup.

Menurut Misra dalam sebuah buku karangan M. Anwas berjudul “*Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*” bahwa pembangunan adalah meningkatkan pencapaian sasaran akan nilai budayanya yang menghasilkan kehidupan yang lebih bermutu.²³ Ini menunjukkan bahwa pembangunan bukan saja pada pertumbuhan ekonomi semata namun yang lebih penting adalah perbaikan kualitas kehidupan diri, social, dan lingkungan meningkat lebih baik.

Jika ditelusuri perkembangan teori pembangunan, maka akan ditemukan paling sedikit tiga akar pemikiran dari berbagai teori pembangunan yang ada. Pertama

²³M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 39.

perubahan, dalam hal ini pembangunan dilihat sebagai suatu proses terjadinya interaksi dengan dunia luar, terutama dengan Negara maju. Perubahan terjadi apabila interaksi dengan Negara maju melalui adopsi jejak langkah perkembangan yang telah mereka lalui, baik tahapan langkah pembangunan ekonomi maupun pengembangan sumber daya manusia. Kedua, perubahan muncul karena ada pergesekan dan perbenturan kepentingan dari berbagai aktor yang ada, yaitu kelompok masyarakat dan Negara. Perubahan terjadi karena perbenturan antara Negara penjajah dan yang dijajah, antara Negara maju dan Negara berkembang, atau kelompok penguasa dan kelompok yang dikuasai. Ketiga, perubahan bukan disebabkan karena sesuatu yang berasal dari sesuatu yang diluar sana, melainkan berasal dari sesuatu yang berada didalam. Dinamika perubahan mengikuti ritma dari ciri-ciri yang ada di dalam komunitas atau masyarakat. Interaksi dengan pihak luar bukan sesuatu hal yang tabu, namun arah dan indikator perkembangan tidak ditentukan oleh pihak luar.²⁴

Ada dua jenis teori pembangunan yang akan dijelaskan penulis dalam hal ini adalah teori pembangunan modernisasi dan teori pembangunan terpusat pada manusia. Pemikiran pertama menghasilkan teori pembangunan modernisasi. Teori pembangunan modernisasi memiliki akar teori evolusi dan teori struktural fungsional. Teori pembangunan modernisasi berusaha menemukan berbagai variabel perkembangan masyarakat yang bisa ditransformasikan menuju modernisasi.

²⁴*Ibid.*, hlm. 40.

Menurut seorang tokoh bernama Smelser, melihat bahwa untuk mengubah masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern perlu adanya diferensiasi struktural. Contohnya pada lembaga keluarga, keluarga luas yang syarat berbagai macam fungsi pendidikan, emosional, pekerjaan, keamanan harus mengalami diferensiasi struktural menjadi keluarga batih yang memiliki fungsi terbatas. Adapun fungsi lainnya diambil alih oleh lembaga lain seperti sekolah untuk fungsi pendidikan, Negara untuk fungsi keamanan.

Pemikiran kedua melahirkan teori pembangunan terpusat pada manusia. Teori yang muncul dari pemikiran ini melihat secara tajam bagaimana pembangunan yang dipraktikkan tidak berpihak pada manusia, setidaknya ditempatkan pada posisi subjek terhadap pembangunan bukan ditempatkan sebagai objek yang selama ini dilakukan oleh Negara penganut modernisasi.²⁵ Kegagalan teori pembangunan modernisasi telah menyadarkan banyak pihak kepentingan terhadap pembangunan agar mengutamakan manusia dalam proyek pembangunan. Hal ini berarti memberikan manusia lebih banyak peluang untuk berpartisipasi secara efektif dalam kegiatan pembangunan sehingga manusia menjadi subjek yang aktif dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi pembangunan. Hal ini bermakna bahwa apapun kebijakan atau program pembangunan harus mengutamakan manusia. Makna tersirat di dalamnya adalah apapun bentuk kerusakan, penyelewengan, kegagalan, kerusakan, berpangkal pada mengabaikan

²⁵Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Perdesaan*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 212-213.

manusia dalam perumusan, implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan dana program.²⁶

Kaitan teori dengan judul penelitian yaitu, disini program Dinas Perikanan Kabupaten Asahan dapat membantu menangani kebutuhan masyarakat desa. Dengan dilaksanakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui budidaya ikan air tawar dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

2. Teori Pemberdayaan Masyarakat

Teori dalam praktek pemberdayaan masyarakat menggambarkan distribusi kekuasaan dan sumberdaya dalam masyarakat, bagaimana fungsi organisasi dan bagaimana sistem dalam masyarakat mempertahankan diri. Teori pemberdayaan masyarakat memberikan petunjuk apa yang sebaiknya dilakukan di dalam situasi tertentu. Berkaitan dengan judul penelitian ini, teori yang penulis gunakan ialah teori konstruktivisme.²⁷ Menurut Glasersfeld yang dikutip Joni Rusmanto mendefinisikan konstruktivisme radikal selalu membentuk konsepsi pengetahuan. Ia melihat pengetahuan sebagai sesuatu hal yang dengan aktif menerima apapun melalui pikiran sehat atau melalui komunikasi.

Teori Konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Beda dengan teori behavioristik yang memahami hakikat belajar sebagai kegiatan yang

²⁶*Ibid.*, hlm. 214-215.

²⁷Joni Rusmanto, *Gerakan Sosial Sejarah Perkembangan Teori Kekuatan dan Kelemahannya*, (Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2013), hlm. 34.

bersifat mekanistik antara stimulus dan respon, sedangkan teori konstruktivisme lebih memahami belajar sebagai kegiatan manusia membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberi makna pada pengetahuannya sesuai dengan pengalamannya. Teori konstruktivisme juga mempunyai pemahaman tentang belajar yang lebih menekankan pada proses daripada hasil. Hasil belajar sebagai tujuan dinilai penting, tetapi proses yang melibatkan cara dan strategi dalam belajar juga dinilai penting.

Pada proses pemberdayaan masyarakat pendekatan teori belajar secara konstruktivisme perlu di tanamkan dan diupayakan agar masyarakat mampu mengkonstruksi pemahaman untuk berubah. Pemberdayaan masyarakat hendaknya tetap mempertahankan nilai-nilai yang sudah melekat di masyarakat selama nilai tersebut baik dan benar. Nilai-nilai kebersamaan, keikhlasan, gotong-royong, kejujuran, kerja keras harus di bangun dan di konstruksikan sendiri oleh masyarakat untuk menciptakan perubahan agar lebih berdaya.²⁸ Keterkaitan dengan konsep pemberdayaan maka aspek ilmu (*knowledge*) yang ada di dalam masyarakat perlu dibangun dengan kuat dan di konstruksikan di dalam masyarakat itu sendiri.

B. Kerangka Konsep

1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara

²⁸*Ibid.*, hlm. 35

mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi.²⁹

a) Prinsip dan Dasar Pemberdayaan

Prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Drijver dan Sajise ada lima macam yaitu:³⁰

- 1) Pendekatan dari bawah (*bottom up approach*): pada kondisi ini pengelolaan dan para stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
- 2) Partisipasi (*participation*): dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.
- 3) Konsep keberlanjutan: merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.

²⁹Haw. Widjaja, *Pemerintah Desa/Marga*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 169.

³⁰D. Sutrisno, "*Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Peningkatannya dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi Mendut Kabupaten Semarang.*" Skripsi Progam Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, (Semarang: Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, 2005), hlm. 18, t.d.

4) Keterpaduan: yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional.

5) Keuntungan sosial dan ekonomi: merupakan bagian dari program pengelolaan.

b) Proses Pemberdayaan Masyarakat

Proses pemberdayaan masyarakat mengandung dua kecenderungan. Pertama proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagai kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Kecenderungan pertama tersebut dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan.

Kecenderungan kedua atau kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.³¹

Kartasmita mengatakan bahwa proses pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga proses yaitu:

1) Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.

Titik tolaknya adalah bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada sumber daya manusia atau masyarakat tanpa daya. Dalam konteks ini, pemberdayaan adalah membangun daya, kekuatan atau kemampuan, dengan mendorong (*encourage*) dan

³¹Prijono dan Pranarka (ed), *Pemberdayaan: Konsep*, hlm. 45.

membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimiliki serta berupaya mengembangkannya.

2) Memperkuat potensi daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*), sehingga diperlukan langkah yang lebih positif, selain dari suasana.

3) Memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaannya dalam menghadapi yang kuat.³²

c) Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan.

Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya atau kemampuan yang dimiliki.

Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik atau material. Pelaku pemberdayaan harus dapat berperan sebagai motivator, mediator, dan fasilitator yang baik. Pelaku pemberdayaan tidak hanya dituntut untuk

³²Kartasasmita, *Pembangunan*, hlm. 23.

memperdaya pengetahuannya, melainkan mereka dituntut meningkatkan keterampilannya dalam mendesain pemberdayaan.

Bentuk-bentuk kemampuan yang relevan dengan kualitas pelaku pemberdayaan yakni:

- 1) Kemampuan untuk melihat peluang-peluang yang ada
- 2) Kemampuan untuk mengambil keputusan dan langkah-langkah yang dianggap prioritas dengan mengacu pada visi, misi, dan tujuan yang mempunyai potensi memberikan input dan sumber bagi proses pembangunan
- 3) Kemampuan menjual inovasi dan memperluas wilayah penerimaan program-program yang diperuntukkan bagi kaum miskin
- 4) Kemampuan memainkan peranan sebagai fasilitator atau meningkatkan kemampuan masyarakat untuk tumbuh berkembang dengan kekuatan sendiri.³³

Paradigma baru dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia adalah paradigma pemberdayaan masyarakat, dimana masyarakat menjadi pusat/titik tekan pembangunan (*people centered development*).

Pendekatan ini menyadari pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian dalam mengelola sumber daya serta memenuhi kebutuhannya. Pemberdayaan merupakan istilah lain dari *empowerment*

³³Tjokrowinoto, *Bentuk-Bentuk Kemampuan yang Relevan dengan Kualitas Pelaku Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 62.

atau penguatan yang berarti pemberian kekuatan pada masyarakat untuk mengatur kehidupannya sendiri.

2. Program Pendampingan Masyarakat

a. Pengertian Program

Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang sama, atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan.³⁴

Program di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan.³⁵ Jones menyebutkan program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan.³⁶

Menurut Charles O. Jones ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu:³⁷

³⁴Muhaimin *et.al*, *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta:Kencana, 2009), hlm. 349

³⁵KBBI, 2016, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), [Online] Available at: <http://kbbi.web.id/rehabilitasi>, [Diakses 21 Oktober 2018 pukul 20.30 WIB]

³⁶Arif Rohman, *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2009), hlm. 101-102.

³⁷Siti Erna Latifi Suryana, "*Implementasi Kebijakan Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh Tamiang*" Tesis Magister Manajemen Pendidikan, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2009), hlm. 72.

1) Pengorganisasian

Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.

2) Interpretasi

Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

3) Penerapan atau Aplikasi

Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya.

b. Pengertian Pendampingan Masyarakat

Pendampingan adalah suatu proses pemberian kemudahan yang diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian klien secara berkelanjutan dapat diwujudkan.³⁸

Pendampingan juga merupakan suatu proses relasi sosial antara pendamping dengan klien. Dengan tujuan untuk memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi. Sesuai dengan pemenuhan

³⁸Direktorat Bantuan Sosial, *Pedoman Pendampingan Pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center*, (Jakarta: Departemen Sosial RI, 2007), hlm. 4.

kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses klien terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan publik lainnya.³⁹

Dari definisi-definisi di atas, pendampingan dapat diartikan sebagai proses relasi sosial antara pendamping dan klien dalam bentuk memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi. Kemudian dapat memenuhi kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses klien terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan publik lainnya. Dengan kata lain, usaha memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian klien secara berkelanjutan dapat diwujudkan.

Masyarakat menurut Mac Iver dan Page adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat.

Menurut Selo Soemardjan, masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.⁴⁰

³⁹Departemen Sosial RI, *Glosarium Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Pusdatin Kesos, 2009), hlm. 122.

⁴⁰Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 22.

Beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan masyarakat memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *society*. Bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

Berdasarkan pengertian tentang pendampingan dan masyarakat, sehingga dapat diartikan bahwa pendampingan masyarakat adalah proses relasi sosial antara pendamping atau fasilitator yang memiliki kompetensi. Menyelenggarakan berbagai pelayanan sosial baik di instansi pemerintah maupun di instansi swasta lainnya. Dengan melibatkan masyarakat dalam bentuk memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan publik lainnya. Oleh sebab itu, usaha-usaha memecahkan masalah sosial dapat mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian masyarakat secara berkelanjutan dapat diwujudkan.

c. Konsep Pendampingan Masyarakat

Dalam konsep pendampingan masyarakat merupakan wacana pembangunan selalu dihubungkan dengan konsep sendiri, partisipasi jaringan kerja dan keadilan. Pada dasarnya diletakkan pada kekuatan tingkat individu sosial dimana partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses

pemberdayaan. Orang-orang harus terlibat dalam proses tersebut sehingga mereka dapat memperhatikan hidupnya untuk memperoleh rasa percaya diri, memiliki harga diri dan pengetahuan untuk mengembangkan keahlian baru yaitu dengan proses secara kumulatif yang mengakibatkan pada pertumbuhan semakin banyak keterampilan yang dimiliki seseorang sehingga semakin baik kemampuan berpartisipasi.

Keberdayaan merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi. Dengan mempergunakan daya kemampuan yang dimiliki seperti kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik atau material. Kemandirian masyarakat dapat dicapai tentu memerlukan sebuah proses belajar. Masyarakat yang mengikuti proses belajar yang baik, secara bertahap akan memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan yang bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan secara mandiri. Berkaitan dengan hal ini, bahwa keberdayaan masyarakat yang ditandai adanya kemandiriannya dapat dicapai melalui proses pemberdayaan.

Keberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan. Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah mereka yang lemah dan tidak memiliki daya, kekuatan atau kemampuan mengakses sumberdaya produktif atau masyarakat terpinggirkan dalam pembangunan. Tujuan akhir dari proses pemberdayaan

masyarakat adalah untuk memandirikan warga masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup keluarga dan mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya.⁴¹

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini untuk menghindari kesamaan penelitian, maka peneliti perlu mencantumkan penelitian terdahulu di dalam penulisan karya ilmiah ini.

Pertama, penelitian skripsi Kristanto dalam menyelesaikan studi pada jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara dengan judul Pemberdayaan Pemerintah Kelurahan Dalam Rangka Pelayanan Masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara pada Desember 2007. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan questioner.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan untuk memberdayakan Pemerintahan Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, untuk mengetahui sejauh mana efektifitas kinerja Pemerintahan Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia dalam usaha membangun daerahnya.

Temuan penelitian ini menunjukkan sistem pelayanan yang selama ini diterapkan pemerintahan kelurahan Sari Rejo dalam aspek sosial, kesehatan,

⁴¹Gunawan Sumudiningrat, *Visi dan Misi Pembangunan Pertanian Berbasis Pemberdayaan*, (Yogyakarta : IDEA, 2000), hlm. 82.

pembangunan, ekonomi pada kenyataannya sudah sangat maksimal, hal itu sangat dipengaruhi oleh kepekaan masyarakat yang ingin turut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan kelurahan. Kemudian perencanaan program pemerintahan kelurahan sebagian sudah terealisasi untuk kepentingan masyarakat, seperti pembangunan atau perbaikan jalan pada lingkungan VIII dan pembuatan saluran drainase.

Kedua, penelitian skripsi Mudi Armi dalam menyelesaikan studi pada jurusan Ilmu Administrasi Negera, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Sumatera Utara dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Dana Desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Tolang Kecamatan Ulupungkut Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2017. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi sumber daya manusia di Desa Tolang Kecamatan Ulupungkut Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian untuk menganalisis pemberdayaan yang mengandung arti melindungi di Desa Tolang Kecamatan Ulupungkut Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian untuk memperkuat potensi atau daya yang dimiliki (*ompowering*) di Desa Tolang Kecamatan Ulupungkut Kabupaten Mandailing Natal.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Tolang Kecamatan Ulupungkut Kabupaten Mandailing Natal maka Potensi sumber daya manusia dalam pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan dana desa di desa Tolang sudah

terlaksana. Salah satunya dalam bidang pembangunan desa ini adalah Perkerasan Rabat Beton Aek Situlam dan Jembatan Gantung Lubuk Singkam. Karena tahun 2016 dana desa baru di keluarkan di bulan November-Desember 2016 yang memiliki 2 tahap pencairan dan kebijakan yang didapat setelah pencairan dana desa. Pembangunan seharusnya dilaksanakan di akhir bulan Desember sampai awal Januari, tetapi karna ada masalah dalam pencairan dana maka program pembangunan baru terlaksana setelah awal bulan Januari sampai awal Februari yaitu pembangunan Perkerasan Rabat Beton Aek Situlam dan Jembatan Gantung Lubuk Singkam.

Ketiga, penelitian skripsi Novalia Waty dalam menyelesaikan studi pada jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara dengan judul Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan Desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Aek Song-Songan, Kecamatan Aek Song-Songan, Kabupaten Asahan pada Agustus tahun 2010. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi langsung, wawancara mendalam dan studi kepustakaan termasuk di dalamnya teknik dokumentasi.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran yang ditampilkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat terhadap pembangunan di Desa Aek Song-Songan. Kemudian untuk mengetahui partisipasi masyarakat Desa Aek Song-Songan dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Aek Song-Songan sudah lama dibentuk di desa tersebut. Perubahan nama dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) terjadi pada tahun 2001. Pembentukan anggota pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dipilih langsung oleh masyarakat desa dalam musyawarah desa yang dilakukan pada periode tertentu. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berjalan cukup baik dibantu dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Sumber dana yang digunakan dalam kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Aek Song-Songan berasal dari dana APPKD dan dana sukarela dari masyarakat Desa Aek Song-Songan. Selain bergerak dalam kegiatan pembangunan desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Aek Song-Songan juga menjalankan beberapa kegiatan di bidang seni dan budaya, keagamaan dan keamanan desa.

Penelitian diatas berbeda dengan penelitian ini. Perbedaanya dari sisi informan yang diteliti, dimana dalam penelitian ini melibatkan Dinas Perikanan dan Kelautan yang merupakan salah satu Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Asahan yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perikanan dan kelautan. Kemudian dari sisi tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya program pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh Dinas Perikanan di Desa Subur Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan. Kemudian untuk mengetahui pelaksanaan yang dilakukan dan kendala yang dihadapi Dinas Perikanan pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Subur. Oleh sebab itu penelitian ini adalah bersifat orisinil.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁵⁸

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini berada di Desa Subur Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan. Desa Subur memiliki luas wilayah 27,33 km² dengan jumlah penduduk 4.316 jiwa yang di dominasi dengan masyarakat beragama Islam dan bersuku jawa. Desa Subur terbagi menjadi 6 dusun yaitu dusun I sampai dengan dusun VI. Sistem mata pencaharian masyarakat Desa Subur pada umumnya bertani.

C. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian sumber data di peroleh dari dua sumber yaitu:

1. Data Primer

Data Primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari informan atau dalam penelitian ini diperoleh dari Dinas Perikanan Kabupaten Asahan.

⁵⁸Lexy J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2007), hlm. 6.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap atau data-data yang memberikan keterangan atau informasi tambahan kepada peneliti sebagai bahan pelengkap penelitian. Dalam hal ini data diperoleh dari Kepala Desa, tim pendampingan, serta masyarakat. Tidak lupa berupa buku-buku, jurnal, dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi, gambar atau foto, dan lain sebagainya yang digunakan sebagai dasar teori dan membantu untuk menganalisa masalah yang mendukung data dalam penulisan penelitian.⁵⁹

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara atau Interview

Teknik wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.⁶⁰ Adapun yang diwawancarai pada penelitian ini adalah:

- a. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Asahan,
- b. Kepala Desa Subur Kecamatan Air Joman,

⁵⁹*Ibid*, hlm. 32.

⁶⁰*Ibid*, hlm. 111.

- c. Tim Pendampingan Masyarakat Dinas Perikanan Kabupaten Asahan,
- d. Masyarakat desa Subur Kecamatan Air Joman

2. Pengamatan atau Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan terhadap suatu proses atau objek dengan maksud memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam melanjutkan suatu penelitian.⁶¹ Teknik observasi adalah cara pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan gejala yang tampak pada objek penelitian yang pelaksanaannya langsung pada tempat dimana suatu peristiwa, kejadian atau situasi yang sedang terjadi. Adapun yang diamati pada kegiatan observasi ini adalah:

- a. Bagaimana upaya Dinas Perikanan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui budidaya ikan air tawar di Desa Subur Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan?
- b. Bagaimana pelaksanaan pendampingan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Subur Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan?
- c. Bagaimana kendala yang dihadapi Dinas Perikanan dalam melaksanakan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Subur Kecamatan Air joman?

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri

⁶¹M. Tatang Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1982), hlm 94.

atau oleh orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan penelitian kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.⁶²

Dengan metode ini, peneliti mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada, sehingga penulis dapat memperoleh catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian seperti: gambaran umum desa, struktur organisasi desa dan personalia, keadaan masyarakat, catatan-catatan, foto-foto dan sebagainya. Metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang belum didapatkan melalui metode wawancara dan obeservasi.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi dan wawancara untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain.⁶³ Setelah data di lapangan dikumpulkan, selanjutnya hal yang dilakukan penyederhanaan data dalam bentuk lebih praktis untuk dibaca dan dipahami, sehingga data tersebut dapat diambil pengertian dan kesimpulan sebagai hasil penulisan.

Ada beberapa cara untuk menganalisis data, tetapi secara garis besarnya dengan langkah-langkah sebagai berikut:

⁶²Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 143.

⁶³Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 104.

1. Reduksi data adalah menelaah kembali data yang telah dikumpulkan baik melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen, sehingga ditemukan data yang sesuai dengan kebutuhan untuk menemukan pertanyaan atau fokus penelitian.
2. Display data adalah pengelompokan data yang tersaji sedemikian rupa dan tersusun secara sistematis, sehingga data terpola untuk melakukan penarikan kesimpulan.
3. Menarik kesimpulan merupakan upaya memaknakan data yang diperoleh sedangkan verifikasi adalah sebuah proses untuk meyakinkan hasil pengumpulan dan pengelolaan data melalui triangulasi.

F. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan derajat ketepatan data yang dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.⁶⁴ Uji validitas menggunakan Reduksi. Reduksi data adalah menelaah kembali data yang telah dikumpulkan baik melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen, sehingga ditemukan data yang sesuai dengan kebutuhan untuk menemukan pertanyaan atau fokus penelitian.⁶⁵

⁶⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 14

⁶⁵*Ibid*, hlm. 464.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Subur

Desa yang dinamakan “Desa Subur” menurut keterangan dari orang-orang terdahulu bahwa masyarakat yang bercocok tanam diatas tanah diwilayah desa ini tumbuhnya selalu subur tanpa menggunakan pupuk organik ataupun non organik, serta masyarakatnya guyub dan rukun *gemah ripa loh jinawi*. Desa Subur memulai perkembangan peradaban dan pemerintah desa pada tahun 1946 – 1950.

Desa yang awalnya merupakan satu Kecamatan dengan Kecamatan Air Joman, kemudian sejak tahun 1972 Desa Subur bergabung dengan Kecamatan Kisaran, kemudian tahun 1980 bergabung dengan Kecamatan Meranti sampai dengan tahun 2008. Dengan adanya pemekaran Kecamatan di Kabupaten Asahan pada tahun 2008 Desa Subur kembali lagi bergabung dengan Kecamatan Air Joman sampai dengan sekarang. Dari sejak berdirinya Desa Subur Kecamatan Air Joman sampai tahun 2017 telah terjadi beberapa kali pergantian kepemimpinan Desa yaitu:

- a. Abdul Halim : 1950 s/d 1968
- b. Warno : 1968 s/d 1970
- c. Yatimin : 1971 s/d 1979
- d. Karno : 1979 s/d 1990
- e. Akub Boyan / Pardede : 1990 s/d 1993

f. Poniman KS : 1993 s/d 2006

g. Zailani : 2006 s/d Sekarang

Desa Subur memiliki luas 2.733 Ha. Desa ini berjarak 3 kilometer dari Kecamatan Air Joman serta dapat ditempuh dengan waktu 15 menit jika menggunakan kendaraan bermotor sedangkan jika dari ibu kota kabupaten dapat ditempuh dengan waktu 25 sampai dengan 30 menit perjalanan menggunakan kendaraan bermotor. Secara teritorial Desa Subur berada di jalan alternatif antara Kota Kisaran menuju Kota Tanjung Balai. Secara lebih terperinci dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 4.1

Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Jumlah KK, Kepadatan Penduduk

Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Jumlah KK	Kepadatan Penduduk (orang/km ²)
2.733 Ha	4.316 jiwa	1.063 KK	158 jiwa

Sumber: Profil Desa Subur Tahun 2017

Desa Subur terletak dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Rawang Panca Arga
- b. Sebelah Timur : Desa Punggulan dan Kelurahan Binjai Sebrangan
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Sei Dadap
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Kisaran Timur

Secara astronomis Desa Subur terletak di $2^{\circ}99'34.1''$ lintang utara – $99^{\circ}67'94.3''$ bujur timur. Kondisi Topografis Desa Subur terletak pada ketinggian ± 7 meter dibawah permukaan laut. Desa Subur memiliki 6 (Enam) dusun yaitu:

- a. Dusun I : Rahmadi
- b. Dusun II : Partono
- c. Dusun III : Efendi
- d. Dusun IV : Supardi
- e. Dusun V : Karmin
- f. Dusun VI : H. Ngatman Wagino

2. Komposisi Penduduk

Desa Subur Kecamatan Air Joman tercatat pada tahun 2017 memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.316 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.063 KK. Desa Subur memiliki penduduk dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 2.123 jiwa. Sedangkan penduduk dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 2.193 jiwa. Jika dilihat dari tingkat kelompok umur penduduknya, Desa Subur merupakan desa yang memiliki penduduk yang paling sedikit di kelompok umur 60 tahun keatas. Secara lebih terperinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

Kelompok Usia	Jumlah Penduduk
0-1	109 jiwa

1-5	394 jiwa
6-15	882 jiwa
16-18	272 jiwa
19-25	556 jiwa
26-56	1.832 jiwa
57+	271 jiwa
Jumlah	4.316 Jiwa

Sumber: Profil Desa Subur Tahun 2017

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Nama Dusun	Penduduk Laki-laki	Penduduk Perempuan	Jumlah Laki-laki + Perempuan	Jumlah KK
Dusun I	533	629	1.162	276
Dusun II	425	422	847	202
Dusun III	292	254	546	115
Dusun IV	388	404	792	222
Dusun V	406	392	798	210
Dusun VI	79	92	171	38

Sumber: Profil Desa Subur Tahun 2017

3. Pendidikan

Jika dilihat dari tingkat pendidikan penduduknya, Desa Subur merupakan desa yang memiliki lulusan SD terbanyak yaitu 897 orang, lulusan SMP sebanyak

479 orang, dan lulusan SMA sebanyak 331 orang. Namun ada juga masyarakat yang sudah sarjana sampai jenjang S2. Secara lebih terperinci dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.4
Tingkat Pendidikan Masyarakat

No	Pendidikan Masyarakat	Tahun 2016	Tahun 2017
1	S2	-	1 orang
2	S1	12 orang	25 orang
3	Tamat D3	12 orang	19 orang
4	Tamat D2	17 orang	20 orang
5	Tamat D1	26 orang	30 orang
6	SMA	323 orang	331 orang
7	SMP	467 orang	479 orang
8	SD	751 orang	897 orang
9	PAUD / TK	119 orang	128 orang
10	Belum Sekolah (0-3 Tahun)	335 orang	340 orang
Jumlah		2.304 orang	2.589 orang

Sumber: Profil Desa Subur Tahun 2017

4. Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat Desa Subur beraneka ragam jenisnya, namun sebagai besar penghasilan utama penduduk desa adalah bekerja pada sektor pertanian,

perkebunan dan perikanan. Kebun dan sawah merupakan tujuan utama aktivitas warga dalam mengisi kebutuhan pokok sehari-hari. Secara lebih terperinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Jenis Mata Pencaharian	Tahun 2016	Tahun 2017
1	PNS	18	18
2	Pegawai Swasta	96	119
3	Wiraswasta/Pedagang	278	281
4	Petani	318	318
5	Nelayan	42	42
6	Buruh tani/Nelayan	135	135
7	Buruh Pabrik	29	42
8	Lainnya	106	110

Sumber: Profil Desa Subur Tahun 2017

5. Sosial-Budaya

Desa Subur merupakan salah satu desa dengan penduduk yang memiliki keberagaman. Dapat dilihat dari jumlah penduduknya sebanyak 4.313 jiwa atau sekitar 99,87% mayoritas agama penduduk Desa Subur adalah beragama Islam. Sedangkan agama lain yang dianut oleh penduduk Desa Subur adalah Kristen Protestan sebanyak 3 orang atau 0,13%.

Tabel 4.6
Keadaan Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah	Persentase (%)
1	Islam	4.313	99,87%

2	Kristen Protestan	3	0,13%
3	Katholik	-	-
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-

Sumber: Profil Desa Subur Tahun 2017

Desa Subur juga memiliki penduduk yang multi etnis. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduknya yang mayoritas adalah suku Jawa sebanyak 3.678 jiwa, kemudian diikuti suku Melayu, suku Batak, Suku Minang, dan Suku Banjar serta suku Aceh. Suku Melayu sebanyak 424 jiwa, suku Batak sebanyak 156 jiwa, suku Minang sebanyak 33 jiwa, suku Banjar sebanyak 8 jiwa, suku Aceh sebanyak 4 jiwa serta suku lain-lain yang menjadi suku penduduk desa setempat ada sebanyak 4 jiwa.

Tabel 4.7

Keadaan Penduduk Berdasarkan Suku

No	Suku	Jumlah	Persentase (%)
1	Jawa	3.678	82,38%
2	Melayu	424	8,07%
3	Batak	156	8,92%
4	Minang	33	0,30%
5	Banjar	8	0,19%
6	Aceh	4	0,05%
7	Lain-lain	4	0,09%

Sumber: Profil Desa Subur Tahun 2017

6. Sarana dan Prasarana

Desa Subur memiliki sarana maupun prasarana infrastruktur yang dapat menunjang aktifitas penduduknya, walaupun ada sarana dan prasarana yang belum ada tetapi masih dapat dijangkau keseluruh wilayah lainnya. Adapun sarana dan prasarana yang terdapat di Desa Subur yaitu:

a. Tempat Ibadah

Di Desa Subur terdapat 8 unit tempat ibadah yaitu 3 unit diantaranya adalah Mesjid dan 5 unit Musholla. Dimana Mesjid dan Musholla ini merupakan sebagai tempat ibadah umat Islam. Tempat ibadah tersebut terletak di setiap dusun. Dari keseluruh letak tempat ibadah dirasakan masyarakat sangat strategis karena dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat desa tersebut.

b. Pendidikan

Di Desa Subur hanya ada 4 sarana pendidikan, yaitu 2 unit Sekolah Dasar (SD), 1 unit Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan 1 unit Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan 1 unit yayasan pesantren tingkat Raudhatul Atfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah. Sedangkan untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) masih terdapat di ibukota kecamatan. Masing-masing sekolah ini berada di dusun yang berbeda, sebagian masyarakat menyekolahkan anaknya di ibukota kecamatan atau kabupaten untuk jenjang SMP dan SMA, karena SMP yang ada di desa tersebut masih baru diresmikan dan sarana pendidikannya belum memadai.

c. Kesehatan

Saranan kesehatan yang ada di Desa Subur adalah Puskesmas Pembantu 1 unit, 5 praktek Dokter/bidan serta 6 posyandu yang terdapat di setiap dusun. Namun untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih memadai masyarakat harus ke ibukota kecamatan atau ibukota Kabupaten yang jarak tempuhnya dengan naik kendaraan bermotor sekitar 15-20 menit perjalanan karena di tempat tersebut sudah ada rumah sakit umum daerah.

d. Transportasi

Sarana transportasi umum di Desa Subur ini yaitu mini bus sebanyak 9 unit dan becak bermotor sebanyak 20 unit. Hampir setiap kepala keluarga mempunyai kendaraan bermotor, menurut sumber kantor desa pengguna sepeda motor di Desa Subur sebanyak 905 unit. Sebagian besar masyarakat menggunakan sepeda motornya masing-masing untuk berpergian menuju desa sekitarnya.

e. Olahraga

Sarana olahraga yang ada di Desa Subur terdiri dari 4 buah sarana olahraga diantaranya 1 buah lapangan bola kaki, 2 buah lapangan Volly, dan 1 buah lapangan takraw. Dengan adanya sarana olahraga ini hampir setiap sore masyarakat berolahraga dan dapat mempererat tali silaturahmi antara masyarakat desa Subur.

Secara lebih terperinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.8
Fasilitas Bangunan di Desa Subur

No	Hasil Bangunan	Jumlah
1	Kantor Desa	1
2	Mesjid	3
3	Musholla	5
4	Praktek Dokter/Bidan	5
5	Posyandu	6
6	Puskesmas Pembantu	1
7	Play Group/PAUD	1
8	TK	2
9	SD/MI	3
10	SMP/MTs	1
11	TPQ	1
12	Pos Keamanan Lingkungan	9
13	Kios	27

Sumber: Profil Desa Subur Tahun 2017

B. Profil Dinas Perikanan Kabupaten Asahan

1. Latar Belakang Dinas Perikanan Kabupaten Asahan

Dinas Perikanan merupakan salah satu unsur penunjang pemerintah dalam membantu Bupati Asahan dalam mendorong peningkatan kegiatan perdagangan produk kelautan dan perikanan antar Kabupaten maupun antara area di dalam wilayah Kabupaten Asahan. Dinas Perikanan Kabupaten Asahan sebagai Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Asahan bertujuan mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Asahan yaitu “Mewujudkan Asahan yang Religius, Sehat, Cerdas, dan Mandiri”.

Untuk mewujudkan visi tersebut Dinas Perikanan Kabupaten Asahan melakukan berbagai upaya strategis, yaitu: meningkatkan hasil perikanan dan kegiatan usaha pembudidaya ikan nelayan skala kecil yang berorientasi pasar, meningkatkan keterampilan dan pendapatan pembudidaya ikan dan nelayan, meningkatkan kegiatan agribisnis perikanan dan menyebarluaskan informasi pasar tentang komoditas perikanan dan informasi teknologi dibidang perikanan.

2. Visi dan Misi Dinas Perikanan Kabupaten Asahan

Visi Dinas Perikanan Kabupaten Asahan merupakan koridor utama kegiatan perikanan, sehingga perlu adanya kesamaan persepsi, pemahaman, dan tindakan dalam mewujudkan pencapaian visi tersebut. Untuk menjadikan Dinas Perikanan Kabupaten Asahan sebagai lembaga yang professional, handal, aspiratif dan partisipatif, maka disusun visi Dinas Perikanan Kabupaten Asahan adalah

“Terwujudnya Usaha Perikanan yang Berdaya Saing, Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan untuk Mensejahterakan Masyarakat Perikanan”

Mengacu pada visi yang diutarakan diatas, maka rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi ditempuh dengan misi Dinas Perikanan Kabupaten Asahan yang disusun sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan prinsip pelayanan publik yang prima
- b. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)
- c. Meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan, nelayan, pengolah, dan pemasar hasil perikanan serta masyarakat perikanan umumnya dengan mendorong terciptanya produk perikanan unggulan daerah
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya perikanan secara efisien melalui pengelolaan sumberdaya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
- e. Meningkatkan penyediaan bahan pangan sumber protein dan bahan baku industri perikanan yang berdaya saing di dalam negeri dan luar negeri
- f. Memantapkan sistem pendukung, yang terdiri dari teknologi, permodalan, sarana dan prasarana, kelembagaan serta iklim usaha yang baik.

3. Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Asahan

Tujuan Dinas Perikanan Kabupaten Asahan yaitu:

- a. Mewujudkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya, pengolah dan pedagang hasil perikanan
- b. Mewujudkan peningkatan pelestarian dan pengendalian sumberdaya perikanan dan kelautan
- c. Mewujudkan tersedianya prasarana dan sarana, teknologi, permodalan, dan kelembagaan dalam usaha perikanan
- d. Mewujudkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang produktif
- e. Mewujudkan penambahan tingkat konsumsi ikan masyarakat, pertumbuhan industri dan ekspor hasil perikanan

Sasaran strategis Dinas Perikanan Kabupaten Asahan yaitu:

- a. Meningkatnya jumlah produksi kelautan dan perikanan
- b. Meningkatnya sumberdaya kelautan dan perikanan yang lestari
- c. Meningkatnya kualitas dan kuantitas usaha kelautan dan perikanan
- d. Meningkatnya lapangan kerja dan tenaga kerja di bidang kelautan dan perikanan
- e. Meningkatnya konsumsi ikan dan terpenuhinya bahan baku industri perikanan untuk lokal, regional maupun ekspor.

Tabel 4.9

Daftar Pegawai Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Asahan

No	Nama	Jabatan
1	Ir. Hazairin, MM	Kepala Dinas
2	Ir. Siti Aisyahm MP	Sekretaris Dinas
3	Tumanda Ritonga, S.PKP	Kabid Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
4	Tommy Prasetya, S.St. Pi	Kabid Pengendalian Usaha Perikanan
5	Rizaldy Situmorang, SP	Kabid Pemberdayaan Masyarakat Perikanan
6	Roidah Sitorus, SP	Kasi Pendidikan, Pelatihan, dan Pendampingan
7	Ahmad Kamrizal Syahputra, SH	Kasi Kemitrausahaan dan Penerapan Teknologi Perikanan
8	Sutimin, SP	Kasi Kelembagaan
9	Jusniar	Kasi Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perikanan Budidaya
10	Ir. Ainun Dahlan	Kasi Pendataan dan Penertiban Tanda Usaha Perikanan
11	Arifin Siregar, SE, MM	Kasi Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Penyelenggaraan TPI
12	Fridis Sianipar, S.Pi	Kasi Pengelolaan Kawasan Budidaya Perikanan
13	Rita Fatmi Hasibuan, S.Pi	Kasi Pengelolaan Kesehatan Ikan Dan Lingkungan
14	Dewi Suherni, SP	Kasi Standarisasi dan Pelestarian Ikan
15	Hj. Misriani, SE, MM	Kasubbag Umum
16	Aisyah Nur, S.Pi	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

17	Hariadi, STP	Staff
18	Irhamsyah Nasution, SP	Staff
19	Diana Masyati, A.Md	Staff
20	Zery Niana Puspa Sary, S.Pi	Staff
21	Fadillah Damanik, A.Md	Staff
22	Sadinem	Staff
23	Syafrianggi Manurung, A.Md	Staff
24	Fahriah, A.Md	Staff
25	Ivani Liana, A.M	Staff
26	Rohma Fitri Br. Sinaga, A.Md	Staff
27	Mahyana Fatmawati, A.Md	Staff
28	Safrizal Hasibuan	Staff
29	Anita	Staff

Sumber: Profil Dinas Perikanan Kabupaten Asahan Tahun 2018

C. Upaya Dinas Perikanan Kabupaten Asahan

Secara umum, pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tiga pilar pembangunan, yaitu pengentasan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan.

Wilayah Kabupaten Asahan yang berada di kawasan pesisir diantaranya Kecamatan Silau Laut, Kecamatan Tanjung Balai, Kecamatan Sei Kepayang Timur, Kecamatan Sei Kepayang Barat dan Kecamatan Sei Kepayang adalah kawasan yang potensial untuk pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pengembangan perikanan juga didukung dengan adanya sungai-sungai besar yaitu sungai Asahan dan sungai Silau serta sungai-sungai kecil lainnya yang melalui

wilayah Kabupaten Asahan. Panjang garis pantai yang mencapai ± 58 km juga merupakan potensi yang sangat besar bagi pengembangan agribisnis dibidang perusahaan perikanan dan kelautan di Kabupaten Asahan.

Dalam kondisi aktual pengembangan perikanan budidaya, masih dihadapkan pada permasalahan implementasi kebijakan tata ruang dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, terbatasnya prasarana saluran irigasi, terbatasnya ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul, kesiapan dalam menanggulangi hama dan penyakit, penyediaan fasilitas kolam dan air yang baik serta permasalahan bahan baku pakan dan kestabilan harga, serta tingginya harga pakan.

Rendahnya produktivitas perikanan budidaya juga disebabkan karena struktur pelaku usaha perikanan budidaya adalah skala kecil/tradisional ($\pm 80\%$), dengan keterbatasan aspek permodalan, jaringan teknologi dan pasar. Disamping itu serangan hama dan penyakit ikan/udang, serta adanya pencemaran yang mempengaruhi kualitas lingkungan perikanan.

Untuk menjawab semua permasalahan pembangunan dan pengembangan perikanan dalam rangka memenuhi kebutuhan protein asal ikan bagi masyarakat, dan pengoptimalan cakupan pembinaan masyarakat terhadap kelompok masyarakat perikanan. Dinas Perikanan Kabupaten Asahan mempunyai beberapa program unggulan diantaranya program unggulan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan

Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) serta program penyuluhan dan bantuan benih ikan.⁷⁴

Selain kegiatan CBIB dan CPIB serta program penyuluhan dan bantuan benih ikan, Dinas Perikanan Kabupaten Asahan mengalokasikan anggaran berbasis skala prioritas dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.10
Uraian Kegiatan Dinas Perikanan

No	Uraian Kegiatan	Volume	Jumlah Paket
1	Pembuatan sampan seruweh beserta perlengkapannya	10 unit	6 paket
2	Pengadaan alat tangkap ikan	604 unit	10 paket
3	Pengadaan keramba	78 unit	2 paket
4	Pengadaan kolam fiber beserta benih ikan dan pakan	559 unit	35 paket
5	Pembuatan kolam terpal beserta benih ikan dan pakan	24 unit	3 paket
6	Pengadaan mesin pembuat pakan ikan	2 unit	2 paket
7	Pengadaan benih ikan air tawar	1.439.327 ekor	68 paket

⁷⁴Wawancara dengan Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Asahan, Ibu Siti Aisyah, pada tanggal 2 April 2019 pukul. 09.30 WIB

8	Pembangunan jalan produksi perikanan/nelayan	680 meter	2 paket
---	--	-----------	---------

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Asahan Tahun 2018

Progres yang diperoleh dari kegiatan tersebut diantaranya:

Tabel 4.11
Progres Kegiatan Dinas Perikanan

No	Kegiatan	Satuan	Tahun	
			2017	2018
1	Pembuatan sampan seruwe	Unit	40	10
2	Pengadaan alat tangkap ikan	Unit	2024	604
3	Pengadaan kolam fiber	Unit	182	559
4	Pengadaan kolam terpal	Unit	61	24
5	Pengadaan mesin pembuat pakan	Unit	4	2
6	Pengadaan benih ikan air tawar	Ekor	980.101	1.439.327
7	Pengadaan keramba	Unit	-	78
8	Pembangunan jalan produksi nelayan	Meter	-	680

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Asahan Tahun 2018

1. Program Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)

Cara budidaya ikan yang baik (CBIB) adalah cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol

sehingga memberikan jaminan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, obat ikan, dan bahan kimia, serta bahan biologis. CBIB secara sederhana dapat diartikan sebagai proses pemeliharaan ikan dengan menjaga kualitas/mutu ikan sehingga akan memberikan hasil panen yang layak untuk dikonsumsi, bebas dari kontaminasi bahan kimia dan biologi. Dengan menerapkan CBIB dalam kegiatan budidaya, akan sangat membantu sehingga dalam proses pemeliharaan ikan menjadi lebih efektif, efisien, memperkecil resiko kegagalan, meningkatkan kepercayaan pelanggan, mendapat jaminan ekspor untuk pasar bebas serta tidak berbahaya bagi lingkungan.

2. Program Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)

Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) adalah mengembangbiakkan ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur, pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol, melalui penerapan teknologi yang memenuhi persyaratan *biosecurity*, maupun telusur (*traceability*) dan keamanan pangan (*food safety*). CPIB merupakan program dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang mengarah pada perbaikan mutu benih ikan yang akan dibudidayakan. Agar penerapan program tersebut di masyarakat dapat berjalan dengan baik, maka harus disusun suatu pedoman penerapannya.

CPIB adalah kegiatan pembenihan ikan yang dilakukan oleh unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan Hatcheri Skala Rumah Tangga (HSRT) berdasarkan

standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Untuk tahun 2018, Kabupaten Asahan berhasil menjadi Kabupaten/Kota terbaik kedua di Indonesia dalam program sertifikasi CPIB dengan jumlah UPR/HSRT yang telah memiliki sertifikasi CPIB berjumlah 13 UPR/HSRT dari total 52 UPR/HSRT yang ada. Pada tahun 2019 akan dilakukan sertifikasi kepada 5 UPR/HSRT di Kabupaten Asahan. Diharapkan dengan bertambahnya jumlah UPR/HSRT yang telah memiliki sertifikasi CPIB, Kabupaten Asahan menjadi Kabupaten/Kota terbaik di Indonesia dalam pengembangan program CPIB.

Maksud Program Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB):

- a. Menjadi pedoman bagi para pelaku usaha pembenihan
- b. Menjadi pedoman bagi para Pembina dan auditor

Tujuan Program Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB):

- a. Membantu pelaku usaha pembenihan dalam meningkatkan daya saing produk
- b. Menjamin keberlangsungan usaha pembenihan

Manfaat Penerapan Program Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB):

- a. Meningkatkan efisiensi produksi dan produktivitas
- b. Mampu telusur
- c. Memperkecil resiko kegagalan
- d. Meningkatkan kepercayaan pelanggan

- e. Meningkatkan daya saing dengan peningkatan mutu benih serta menjamin kesempatan ekspor.⁷⁵

3. Program Bantuan Benih Ikan

Dinas Perikanan memberikan bantuan benih ikan lele sebanyak 55.000 ekor untuk 158 kepala keluarga (KK) kepada masyarakat Desa Subur Kecamatan Air Joman. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga dengan membesarkan ikan dan mengolah kembali di pekarangan rumah. Selain itu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gizi keluarga sehingga dari 158 rumah yang memiliki kolam ikan dapat semakin cerdas dan mandiri sesuai dengan visi – misi pemerintahan Kabupaten Asahan.

Sebelum diserahkan bibit ikan, Dinas Perikanan bersama tim penggerak PKK telah melakukan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat desa Subur tentang budidaya ikan lele di pekarangan rumah. Dinas Perikanan juga memberikan bantuan kolam yang terbuat dari terpal dengan ukuran 2x4 meter beserta pakan. Dengan adanya penyaluran benih ikan lele tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat, menjadikan masyarakat lebih mandiri dan eksis melanjutkan usaha ikan lele untuk menambah perekonomian keluarga.

Dinas Perikanan Kabupaten Asahan beserta tim pendamping yang sudah melaksanakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Subur telah memberikan hasil yang baik. Tim PKK Kabupaten Asahan beserta Desa Subur

⁷⁵Wawancara dengan Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Asahan, Ibu Siti Aisyah, pada tanggal 2 April 2019 pukul. 09.30 WIB

terpilih sebagai juara I juara hatinya PKK dalam kategori pemanfaatan pekarangan rumah dan menjadi juara II Desa Terbaik tingkat Provinsi Sumatera Utara. Budidaya ikan lele sudah menjadi penghasilan utama untuk sebagian masyarakat yang disebut pembudidaya.

Sudah 15 orang dari seluruh pembudidaya yang berhasil menjadi contoh untuk masyarakat lain sebagai pembudidaya ikan lele yang dapat memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan perekonomian mereka. Namun ada juga masyarakat yang hanya memelihara ikan lele untuk di konsumsi sehari-hari. Secara lebih terperinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.12
Laporan Perkembangan Produksi Pembesaran Rumah Tangga
Budidaya Perikanan Desa Subur

No	Nama RTP	Luas Lahan (m ²)	Jenis Usaha			Waktu Pembesaran
			Pembesaran	Produksi / Siklus Budidaya (Kg)	Produksi/ Tahun (Kg)	
1	Boiman	160	✓	3155	12620	2017 s/d sekarang

2	Teguh Rahayu	25	✓	2400	9600	2018 s/d sekarang
3	Sularman	280	✓	2850	11400	2015 s/d sekarang
4	Somadi	160	✓	2800	11200	2017 s/d sekarang
5	Ismail Manurung	25	✓	2800	11200	2017 s/d sekarang
6	Ponimin	280	✓	2800	11200	2017 s/d sekarang

7	Tamser	400	✓	2800	11200	2017 s/d sekarang
8	Selamat	360	✓	1200	4800	2018 s/d sekarang
9	Nano	56	✓	2800	11200	2017 s/d sekarang
10	Ponidi	113	✓	1200	4800	2018 s/d sekarang
11	Ngadirin	160	✓	2800	11200	2017 s/d sekarang

12	Irwan	150	✓	1200	4800	2017 s/d sekarang
13	Sartik	84	✓	2800	11200	2017 s/d sekarang
14	Suwardi	180	✓	1200	4800	2018 s/d sekarang
15	Ismail Nasution	81	✓	2800	11200	2017 s/d sekarang

Sumber: Laporan Dinas Perikanan Tahun 2018

*RTP = Rumah Tangga Produsen

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa siklus produksi budidaya ikan lele diangka minimum 1200 - 3155 ekor. Hasil produksi yang didapat dalam pertahun diangka minimum 4800 – 12620 ekor. Untuk lokasi pemasaran ikan menjangkau ke daerah Asahan, Tanjung Balai, hingga Aek Kanopan. Masyarakat yang menjadi pembudidaya hanya dari Dusun I sampai Dusun V. Hal ini sangat disayangkan karena menjadi pembudidaya ikan lele mempunyai peluang yang sangat besar untuk

memperbaiki kualitas perekonomian masyarakat. Dinas Perikanan akan memberikan bantuan untuk masyarakat yang ingin menjadi pembudidaya ikan lele dari skala kecil hingga skala yang besar.

D. Pelaksanaan Pendampingan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pelaksanaan program pendampingan pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh Dinas Perikanan Kabupaten Asahan sudah dimulai sejak tahun 2017. Hal ini diawali dengan Desa Subur menjadi peserta dalam lomba pemanfaatan perkarangan hatinya Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) pada pertengahan tahun 2018. Setelah ditindak lanjutin oleh Tim Penggerak PKK Kecamatan kemudian terdapat lima Ogranisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sudah di SK-kan oleh Bupati Asahan dan terlibat langsung dalam pelaksanaan pemberdayaan tersebut diantaranya Dinas Perikanan yang dalam hal ini mengembangkan program pembudidayaan ikan, Dinas Pertanian yang memanfaatkan pekarangan rumah dengan menanam tanaman toga, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan terakhir Dinas Ketahanan Pangan.

Namun berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siti Aisyah selaku Sekretaris Dinas Perikanan mengatakan semua Ogranisasi Perangkat Daerah (OPD) terlibat pada hari penentu dimana tim penilai dari pusat mendatangi Desa Subur sebagai peserta katerogi desa terbaik pada tahun 2018 yang mewakili Kabupaten Asahan.⁷⁶

⁷⁶Wawancara dengan Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Asahan, Ibu Siti Aisyah, pada tanggal 8 April 2019 pukul. 09.30 WIB.

Ada beberapa alasan terkait pemilihan lokasi pemberdayaan diantaranya Desa Subur tidak terlalu jauh dari pusat kota sehingga dapat membantu akses menuju kesana. Kemudian adanya potensi di desa tersebut seperti sumber daya manusia yang masih mau merespon terhadap perkembangan teknologi dan masih mempunyai tingkat kemauan seperti halnya dalam mengikuti pelatihan dan partisipasi lainnya.

Pada saat pelaksanaan pendampingan berlangsung, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya Dinas Perikanan mengawali dengan melakukan penyuluhan dan pelatihan pembudidayaan ikan lele. Di pelatihan tersebut tim pendampingan masyarakat memaparkan bagaimana cara perbaikan kondisi air, cara penanganan untuk pembudidaya, cara memberi pakan dengan baik, dan cara menjadikan benih ikan sebagai peningkatan ekonomi keluarga serta tim pendamping masyarakat juga menghimbau untuk sadar terhadap gizi dengan gemar memakan ikan. Penyuluhan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya masyarakat desa Subur.⁷⁷

Desa Subur mempunyai sumber daya alam yang sangat berlimpah sesuai dengan namanya “Subur” apa yang dapat ditanam di desa itu akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Hal ini yang menjadikan desa Subur sebagai perwakilan Kabupaten Asahan untuk ikut sertakan dalam lomba desa terbaik tingkat provinsi. Setelah melakukan pelatihan dan penyuluhan, tim pendampingan masyarakat

⁷⁷Wawancara dengan Tim Pendampingan Masyarakat, Ibu Isma Amelia, pada tanggal 2 April 2019 pukul 11.30 WIB.

mendata masyarakat yang ingin berpartisipasi untuk pembuatan kolam terpal di pekarangan rumahnya.

Setelah diadakan pendataan, tim pendamping memberikan benih ikan lele kepada masyarakat dan tim sangat intens memberikan motivasi kepada masyarakat agar dapat membudidayakan ikan lele tersebut. Kurang lebih 350 ekor benih ikan lele dibagikan kepada 158 kepala keluarga. Selama beberapa bulan tim pendamping tetap mendampingi masyarakat agar proses budidaya ikan lele tersebut berhasil dan dapat dimanfaatkan sebagai peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pelaksanaan pendampingan berlangsung mulai dari tahun 2017 hingga sampai di hari penentu dimana tim penilai dari pusat datang ke Desa Subur untuk menilai hasil dari pemanfaatan pekarangan rumah yang dalam hal ini masuk ke dalam kategori perlombaan juara hatinya PKK dan desa terbaik tingkat provinsi. Buah dari usaha yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Asahan terkhusus Dinas Perikanan adalah menjadikan Desa Subur sebagai juara II terbaik.

Segala usaha yang dilaksanakan oleh tim pendamping dari Dinas Perikanan tidak lepas dari bentuk kerjasama antara pihak Dinas Perikanan dengan perangkat desa diantaranya Kepala Desa Subur. Kepala Desa Subur juga banyak mengemban amanah seperti dalam memotivasi masyarakat agar tetap senantiasa turut berpartisipasi dan mampu bekerja sama dengan pemerintah daerah. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa terdapat banyaknya kendala ataupun hambatan yang terjadi. Bahkan tim pendamping mengatakan juga bahwa ini bukan suatu permasalahan yang besar, masyarakat hanya perlu motivasi dengan perlahan namun

pasti. Semua usaha ini bertujuan agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lebih mandiri kedepannya.⁷⁸

E. Kendala Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Dapat disimpulkan bahwa kendala-kendala/hambatan yang dihadapi Dinas Perikanan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Subur diantaranya, yaitu:

1. Tingkat Pendidikan

Kendala yang paling utama adalah masih rendahnya tingkat pendidikan yang ingin diberdayakan. Rendahnya pendidikan seseorang dapat mempengaruhi pola pikirnya begitu juga yang terjadi saat Dinas Perikanan sedang melaksanakan pelatihan dan penyuluh masih ada sebagian masyarakat yang mengabaikannya.

2. Partisipasi Masyarakat

Rendahnya tingkat pendidikan juga mempengaruhi perilaku seseorang. Dengan begitu apabila ada penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perikanan kepada masyarakat, masyarakat tersebut kurang aktif bahkan ada yang tidak mau diajak untuk berpartisipasi, ada juga sebagian masyarakat yang sudah diberikan bantuan tetapi tidak tahu apa yang ingin dikerjakan, masih menunggu instruksi dari tim pendamping padahal tim

⁷⁸Wawancara dengan Tim Pendampingan Masyarakat, Ibu Isma Amelia, pada tanggal 2 April 2019 pukul 11.30 WIB.

pendamping sudah memberikan semaksimal mungkin arahan kepada masyarakat.⁷⁹

⁷⁹Wawancara dengan Tim Pendampingan Masyarakat, Ibu Isma Amelia, pada tanggal 8 April 2019 pukul 10.30 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan dari peneliti serta uraian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Perikanan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sudah berjalan dengan baik. Program pemberdayaan ini diawali dengan diadakan penyuluhan bagi masyarakat atau pembudidaya ikan lele, diantara memberikan informasi bagi masyarakat bagaimana Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB). Kemudian setelah dilakukannya penyuluhan dan pelatihan Dinas Perikanan memberikan bantuan diantaranya pembuatan kolam terpal di pekarangan rumah yang nantinya diisi dengan benih ikan lele yang diberikan oleh Dinas Perikanan. Benih ikan lele yang diberikan nantinya diharapkan dapat menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat Desa Subur, ataupun masyarakat dapat mengkonsumsi ikan tersebut.
2. Pelaksanaan pendampingan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan diawali memaparkan bagaimana cara perbaikan kondisi air, cara penanganan untuk pembudidaya, cara memberi pakan dengan baik, dan cara menjadikan benih ikan sebagai peningkatan ekonomi keluarga serta tim pendamping masyarakat juga menghimbau

untuk sadar terhadap gizi dengan gemar memakan ikan. Selama beberapa bulan tim pendamping tetap mendampingi masyarakat agar proses budidaya ikan lele tersebut berhasil dan dapat dimanfaatkan sebagai peningkatan kualitas hidup masyarakat

3. Dalam menjalankan programnya, Dinas Perikanan Kabupaten Asahan masih banyak mengalami kendala/hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perikanan itu sendiri, yaitu diantaranya tingkat pendidikan sebagian masyarakat yang masih rendah sehingga menghambat kepekaan masyarakat dalam melaksanakan pelatihan. Partisipasi masyarakat juga masih kurang, hanya sebagian masyarakat yang ingin bergabung bahkan ada yang tidak mau diajak untuk berpartisipasi. Kemudian ada juga sebagian masyarakat yang sudah diberikan bantuan tetapi tidak tahu apa yang ingin dikerjakan, masih menunggu instruksi dari tim pendamping padahal tim pendamping sudah memberikan semaksimal mungkin arahan kepada masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini, dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Dinas Perikanan Kabupaten Asahan agar kegiatan/program pemberdayaan ekonomi masyarakat ini lebih ditingkatkan sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan memberikan perubahan bagi kualitas kehidupan masyarakat tersebut, kemudian agar tidak berhenti memberikan program pemberdayaan lainnya,

serta agar tidak hanya memberikan program ketika ada kegiatan perlombaan saja.

2. Disarankan kepada Organisasi Perangkat Daerah agar dapat mencontoh sisi positif dari proses program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan sehingga dapat memberikan buah hasil bagi Kabupaten Asahan.
3. Disarankan kepada Kepala Desa agar selalu sabar dalam memberikan motivasi bagi masyarakat agar dapat mempertahankan hasil dan tetap menjadikan contoh desanya sebagai desa terbaik.
4. Disarankan kepada masyarakat untuk tetap bekerja sama kepada pemerintah desa ataupun pemerintah kabupaten sehingga terjalin komunikasi yang dan dapat memberikan hasil yang positif dikedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, 2013. Pembangunan Perdesaan: Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Anwas, M, 2014. Pemberdayaan Masyarakat di Era Global, Bandung: Alfabeta
- Arifin, M. Tatang, 1982. Menyusun Rencana Penelitian, Jakarta: Rajawali Press
- Damsar dan Indrayani, 2016. Pengantar Sosiologi Perdesaan, Jakarta: Kencana
- Herdiansyah, Haris, 2010. Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta: Salemba Humanika
- Kartasmita, Ginandjar, 1996. Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, Jakarta: CIDES
- KBBI, 2016, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), [Online] Available at: <http://kbbi.web.id/rehabilitasi>, [Diakses 21 Oktober 2018]
- Moleong, Lexy J, 2007. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset
- Muhadjir, Noeng, 1996. Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Rake Sarasin
- Muhaimin, et.al, 2009. Manajemen Pendidikan, Jakarta: Kencana
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

- Prijono dan Pranarka, (ed)., 1996. Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi, Jakarta: CSIS
- Rencana Kerja Desa Subur Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan Tahun 2017
- Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Asahan Tahun 2018
- Republik Indonesia, Departemen Agama, 1933. Al-Qur'an dan Terjemahan, Jakarta: Intermasa
- Republik Indonesia, Departemen Sosial, 2009. Glosarium Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Jakarta: Pusdatin Kesos
- Rohman, Arif, 2009. Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan, Yogyakarta: LaksBang Mediatama
- Rusmanto, Joni, 2013. Gerakan Sosial Sejarah Perkembangan Teori Kekuatan dan Kelemahannya, Sidoarjo: Zifatama Publishing
- Santoso, Purwo, 2003. Pembaharuan Desa Secara Partisipatif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Siagian, Sondang P, 2000. Administrasi Pembangunan, Jakarta: Bumi Aksara
- Siagian, Sondang P, 1980. Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya, Jakarta: Bumi Aksara

- Soekanto, Soerjono, 2006. Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sosial, Direktorat Bantuan, 2007. Pedoman Pendamping Pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center, Jakarta: Departemen Sosial RI
- Sugiyono, 2008. Metode Penelitian Bisnis, Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi, 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Bandung: Refika Aditama
- Sumudinigrat, Gunawan, 2000. Visi dan Misi Pembangunan Pertanian Berbasis Pemberdayaan, Yogyakarta: IDEA
- Suryana, Siti Erna Latifi, 2009. “Implementasi Kebijakan Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh Tamiang” Tesis Magister Manajemen Pendidikan, Medan: Universitas Sumatera Utara
- Sutrisno, D, 2005. “Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Peningkatannya dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi Mendut Kabupaten Semarang.” Skripsi Progam Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Semarang: Fakultas Teknik Universitas Diponegoro
- Tjokrowinoto, 2001. Bentuk-Bentuk Kemampuan yang Relevan dengan Kualitas Pelaku Pemberdayaan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah

Widjaja, Haw, 2003. Pemerintah Desa/Marga, Jakarta: Raja Grafindo Persada

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. Pertanyaan Umum

1. Bagaimana latar belakang Dinas Perikanan Kabupaten Asahan?
2. Apa visi dan misi Dinas Perikanan Kabupaten Asahan?
3. Apa tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Asahan?
4. Bagaimana sejarah Desa Subur Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan?
5. Bagaimana profil Desa Subur Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan?

B. Pertanyaan Tujuan Penelitian

1. Hal-hal apa saja yang telah dilakukan Dinas Perikanan dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui budidaya ikan air tawar?
2. Apa saja upaya yang dilakukan Dinas Perikanan dalam meningkatkan budidaya ikan air tawar?
3. Apa saja manfaat untuk Dinas Perikanan dan desa terhadap program pemberdayaan ekonomi masyarakat?
4. Apa yang melatarbelakangi program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui budidaya ikan air tawar?
5. Apa yang menjadi hal menarik dari Dinas Perikanan sehingga membuat program pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Subur Kecamatan Air Joman?
6. Apa saja tahapan yang dilakukan supaya pelaksanaan dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat tersebut tercapai?
7. Apa saja strategi yang dilakukan dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat?
8. Sejak kapan pelaksanaan pendampingan dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat tersebut?

9. Bagaimana respon masyarakat terhadap program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Dinas Perikanan?
10. Apa hambatan dan keberhasilan yang dicapai Dinas Perikanan dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui budidaya ikan air tawar?
11. Apa saja kendala yang dihadapi Dinas Perikanan dalam melaksanakan program pemberdayaan tersebut?
12. Apa saja yang menjadi faktor penghambat atau kendala jika ada peternak ikan yang terlibat?

LAMPIRAN



Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Asahan



Wawancara dengan Ibu Ir. Siti Aisyah Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Asahan



Kantor Kepala Desa Subur Kecamatan Air Joman



Wawancara dengan Bapak Zailani Kepala Desa Subur



Foto Bersama Pembudidaya Ikan di Desa Subur



Kolam Terpal Hasil Program Dinas Perikanan



Kolam Terpal Pemanfaatan Pekarangan Rumah



Spanduk Pemanfaatan Lahan Pekarangan Rumah.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas

Nama : Wahyu Rizky Parmanda
Tempat, Tanggal lahir : Kisaran, 12 Agustus 1998
Alamat : Jl. Maria Ulfa Santoso Gg. Putra Anda
No Hp : 0812 6092 7049

B. Pendidikan

Tahun 2003-2009 : SDN 010097 Selawan
(Lulus dan Berijazah)
Tahun 2009-2012 : SMPN 6 Kisaran
(Lulus dan Berijazah)
Tahun 2012-2015 : SMAN 1 Kisaran
(Lulus dan Berijazah)
Tahun 2015-Sekarang : S1 UIN Sumatera Utara
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

C. Pengalaman Organisasi

Ketua Umum HMJ Pengembangan Masyarakat Islam Tahun 2017-2018
Ketua Umum Forum Komunikasi Mahasiswa PMI wilayah Sumatera Tahun
2018-2019

Medan, 11 Juni 2019

Wahyu Rizky Parmanda
NIM. 13.15.4.042